

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan semua perusahaan baik itu BUMN maupun perusahaan swasta pada umumnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaannya yang pencapaiannya sering kita sebut dengan kinerja. Kinerja perusahaan dapat dikatakan sehat jika perusahaan dapat menjalankan proses bisnis dan manajemen yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan *customer* yang puas dan berdampak terhadap kenaikan pendapatan, dan akan menghasilkan karyawan yang produktif dan memiliki komitmen tinggi untuk menghasilkan nilai bagi *customer*, sehingga diharapkan berdampak terhadap penurunan biaya dalam jangka panjang.

Keunggulan kinerja keuangan perusahaan dapat terlihat dari adanya pertumbuhan tingkat *Return On Investment* (ROI) yang merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan investasi yang ditanamkan untuk memperoleh laba tersebut. Sehingga dapat terlihat seberapa efisien perusahaan menanamkan dananya dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan.

Dalam menghadapi persaingan global, BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia di samping perusahaan swasta dan koperasi dituntut untuk mampu tampil sebagai lembaga bisnis yang tangguh dan efisien. Namun dewasa ini BUMN tengah mengalami penurunan dalam pendapatannya bahkan ada juga beberapa di antaranya yang mengalami kerugian. Hal ini terus berlangsung

semenjak pertengahan tahun 1997-an yang menyebabkan kemunduran ekonomi Indonesia secara mendasar. Nilai rupiah yang terus melemah hingga mencapai 4 sampai 5 kali lipat pada pertengahan tahun 1998 telah menyebabkan tidak menentunya ekonomi yang ditandai oleh merosotnya pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi, jutaan pegawai yang terkena PHK dan merosotnya secara drastis tingkat pendapatan masyarakat. Dan hal ini berdampak langsung terhadap kinerja BUMN itu sendiri, perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2000 BUMN memiliki total aset sebesar Rp. 861,52 triliun hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 13,34 triliun atau dengan tingkat *Return On Asset (ROA)* sebesar 1,55%. Tabel berikut menunjukkan bahwa tingkat ROA BUMN Indonesia pada 5 tahun terakhir hanya berkisar antara 1,55% sampai dengan 3,25%.

Tabel 1.1
KINERJA BUMN DILIHAT DARI PEROLEHAN LABA
(juta rupiah)

TAHUN	TOTAL ASSET	LABA BERSIH	ROA
1997	425,971,407	7,310,092	1.72%
1998	437,756,394	14,226,201	3.25%
1999	607,022,845	14,271,101	2.35%
2000	861,520,494	13,336,582	1.55%
2001	845,186,151	20,186,469	2.39%

Sumber: Laporan Perkembangan Kinerja BUMN - Dirjen Pembinaan BUMN, 2001

Dengan jumlahnya yang cukup banyak dan bergerak di hampir seluruh sektor ekonomi, transportasi, manufaktur, pertambangan, perdagangan, keuangan (bank dan non bank), telekomunikasi, listrik, dan bahkan di antaranya bergerak di

industri vital seharusnya BUMN mampu menambah kas bagi negara sebagai pendapatan.

Berdasarkan pertumbuhan pendapatan usaha 13 BUMN termasuk dalam kelompok *High Sustainable Growth*, dengan pertumbuhan rata-rata 18% yang mempunyai kontribusi pendapatan 34%, 19 BUMN termasuk dalam kelompok *Sustainable Growth* dengan pertumbuhan rata-rata antara 7% sampai dengan 18% yang mempunyai kontribusi pendapatan 45% dan 10 BUMN termasuk dalam kelompok *Low Growth*, dengan pertumbuhan rata-rata kurang dari 7% yang mempunyai kontribusi pendapatan sebanyak 11%. Sementara 103 BUMN lainnya hanya mempunyai kontribusi pendapatan sebanyak 10%. Dengan demikian tampak bahwa sebanyak 103 BUMN yang lambat pertumbuhannya. Modul I BPKP, (2003:99)

Jumlah BUMN menurut BPKP yang ada hingga Januari 2002 mencapai 161 perusahaan termasuk 14 anak perusahaan *Holding* PT Pusri dan PT BPIS, 13 BUMN Perum dan 15 BUMN Perjan serta 21 Badan Usaha Patungan minoritas. Delapan dari 161 BUMN tersebut sudah *Go Public* dan sahamnya tercatat di *Jakarta Stock Exchange*. Namun hingga saat ini secara umum kinerja BUMN menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, laba yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan modal yang ditanamkan sehingga negara justru mengalami kerugian. Akibatnya timbul beberapa silang pendapat tentang masa depan BUMN di Indonesia.

Hingga tahun 2005, tingkat kerugian BUMN semakin membesar. Beberapa BUMN mengalami kerugian hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.2. di bawah ini :

TABEL 1.2
TINGKAT KERUGIAN PERUSAHAAN BUMN TAHUN 2005

No	Perusahaan	Kinerja Keuangan
1	PT. Dirgantara Indonesia (DI)	Rp. 7.253 miliar
2	PT. KAI (Persero)	Rp. 2.599 miliar
3	PT. Pusri	Rp. 5.130 miliar
4	PT. Taspen	Rp. 2.110 miliar
5	PT. Pos Indonesia (Persero)	Rp. 180 miliar

Sumber : Hasil audit BUMN yang disampaikan Darmin Nasution, Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

PT. Kereta Api (Persero) sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi massal seperti terlihat pada tabel di atas mengalami kerugian yang cukup besar. Padahal dengan bentuk perusahaan yang semenjak tahun 1999 telah berubah dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan seharusnya PT. Kereta Api (Persero) bisa menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dalam hal ini pemerintah, sehingga PT. Kereta Api (Persero) bisa menambah bagi kas negara sebagai pendapatan dan memberikan sumbangan bagi pembangunan Indonesia. Maka sudah sepantasnya dengan perubahan bentuk perusahaan dari Perum menjadi Persero pihak manajemen mengelola perusahaan menjadi lebih baik karena adanya perbedaan tujuan yang jelas dari didirikannya Perum dan Persero.

Tujuan Perum sebagaimana tertulis dalam Undang Undang No 23 tahun 2003 pasal 36 adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Sedangkan maksud dan tujuan dari pendirian Persero sebagaimana tertulis dalam UU No.23 Tahun 2003 pasal 12 adalah menyediakan barang dan

atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

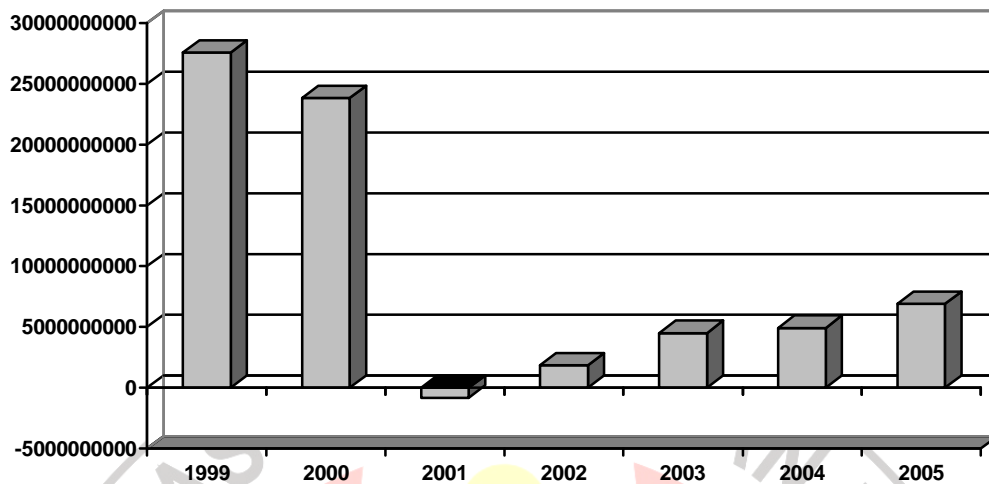
Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat perbedaan yang jelas dari maksud dan tujuan pendirian perusahaan Perum dengan Persero. Perum lebih menitikberatkan kepada kemanfaatan umum sedangkan Persero lebih menitikberatkan kepada peningkatan profit perusahaan. Pada kasus PT. Kereta Api (Persero), ketika perusahaan masih berbentuk Perum yang lebih dikenal dengan nama Perumka tujuan perusahaan adalah kepada kemanfaatan umum, sehingga kebijakan tarif kereta api diusahakan serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Sedangkan ketika perusahaan telah berubah bentuk menjadi Persero tujuan perusahaan telah berubah yaitu menjadi lebih komersil. Sehingga dasar penentuan tarif kereta api diusahakan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

Akan tetapi pada kenyataannya selama tujuh tahun sesudah bentuk perusahaannya berubah dari Perum menjadi Persero, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) belum menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang signifikan, seperti yang terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Laba PT. Kereta Api (Persero) setelah menjadi Persero

Tahun	Laba (Rugi)
1999	Rp. 27.578.835.700
2000	Rp. 23.856.438.459
2001	Rp. (820.162.037)
2002	Rp. 1.851.142.754
2003	Rp. 4.501.363.600
2004	Rp. 4.912.766.267
2005	Rp. 6.907.966.625

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Kereta Api (Persero) diolah



Gambar 1.1
Grafik tingkat Laba Bersih PT. Kereta Api (Persero) tahun 1999-2005

Seperti terlihat pada tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas bisa terlihat laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perusahaan selama kurun waktu berbentuk Persero terus mengalami penurunan Berdasarkan data tersebut di atas maka diperlukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan ketika telah berbentuk Persero yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan kinerja keuangan perusahaan ketika masih berbentuk Perum. Dari perbandingan ini bisa diketahui dengan perubahan bentuk perusahaan dari Perum menjadi Persero apakah telah menimbulkan perbedaan terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi relatif lebih baik

Penilaian terhadap kinerja perusahaan mengalami perluasan pada perspektif keuangan dan non keuangan yang dikenal dengan metode *Balanced Scorecard*. Dalam *Balanced Scorecard* penilaian kinerja perusahaan diukur dari empat perspektif, yakni perspektif keuangan, perspektif *customer*, perspektif proses bisnis intern, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penelitian ini lebih terfokus pada penilaian kinerja perusahaan di dalam perspektif keuangannya. Perspektif keuangan dalam konsep *Balanced Scorecard* mengandung arti bahwa keberlangsungan suatu unit bisnis strategis sangat tergantung pada posisi dan kekuatan finansialnya. Melalui keunggulan di bidang keuangan, organisasi menguasai sumber daya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tiga perspektif strategis lainnya, *customer*, proses bisnis dan intern, dan pembelajaran pertumbuhan.

Perspektif memberikan kerangka kerja dalam pengukuran. Ukuran dalam perspektif keuangan dapat diukur melalui aspek pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya dan tingkat ROI. Mulyadi (2001 : 4) menyatakan tentang indikator / ukuran kinerja perusahaan pada perspektif keuangan dalam bukunya, yaitu :

“Penilaian kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan menggunakan ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan peningkatan ROI”

Amin Widjaya Tunggal (2001 : 4) juga menyatakan hal yang sama bahwa kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan dapat diukur dengan tiga macam ukuran yaitu ROI, pertumbuhan pendapatan dan pengurangan biaya secara signifikan.

Ukuran pertumbuhan pendapatan menunjukkan strategi perusahaan dalam perluasan pangsa pasar atau pengguna jasa produk perusahaan apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak. Ukuran penurunan biaya menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Ukuran tingkat ROI merupakan rasio profitabilitas yang membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba

tersebut, sehingga dapat terlihat seberapa efisien perusahaan menanamkan dananya dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan.

Melalui ketiga aspek ukuran keuangan tersebut, akan memberikan gambaran bagi pihak perusahaan atas tindakan yang telah dilakukannya serta pengaruh dari tindakan tersebut terhadap peningkatan keuangan perusahaannya. Sehingga bisa dijadikan dasar perencanaan tindakan yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan nilai bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) ketika perusahaan berbentuk Perum dan ketika Perusahaan berbentuk Persero yang diukur dalam perspektif keuangan meliputi pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, serta ROI sehingga bisa diketahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang tentunya menjadi relatif lebih baik dengan perubahan bentuk perusahaan dari Perum menjadi Persero, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT. KERETA API (PERSERO) (Sebelum Dan Sesudah Perubahan Bentuk Perusahaan Dari Perum Menjadi Persero Dinilai Dalam Perspektif Keuangan)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, pada penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) ketika badan usaha masih berbentuk Perum yang dinilai dalam perspektif keuangan meliputi ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, serta ROI.
2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) ketika badan usaha telah berbentuk Persero yang dinilai dalam perspektif keuangan meliputi ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, serta ROI.
3. Apakah terdapat perbedaan dengan adanya perubahan bentuk perusahaan dari Perum menjadi Persero terhadap kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang dinilai dalam perspektif keuangan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data dari dokumen perusahaan berupa laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang kemudian akan dilakukan pengukuran rasio-rasio untuk menentukan kinerja dalam perspektif keuangan perusahaannya.

Data hasil pengukuran tersebut kemudian akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan sebelum dan sesudah perubahan bentuk perusahaan dari Perum menjadi Persero, dan hasilnya bisa di bandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan perubahan bentuk perusahaan

tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dinilai dalam perspektif keuangan.

Dari maksud penelitian tersebut dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah :

- a. Mengetahui kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) sebelum perubahan bentuk perusahaan menjadi perusahaan perseroan yaitu ketika bentuk perusahaan adalah Perusahaan Umum yang dinilai dalam perspektif keuangan berdasarkan ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, serta ROI.
- b. Mengetahui kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) sesudah perubahan bentuk perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan yang dinilai dalam perspektif keuangan berdasarkan ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, serta ROI.
- c. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan adanya perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan Umum kepada Perusahaan Perseroan terhadap kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) yang dinilai dalam perspektif keuangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan masalah ini, dan sekaligus sebagai bahan kajian serta masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan konsep, teori, dan penerapan konsep *Balanced Scorecard* pada salah satu perspektifnya, yakni perspektif keuangan.

2) Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau informasi dan juga sebagai sumbangan pemikiran kepada perusahaan di dalam mengukur kinerja keuangan perusahaannya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Dan bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk penerapan teori tentang pengukuran kinerja dengan *Balanced Scorecard* secara konkret khususnya dalam perspektif keuangan.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berdasarkan pasal 9, BUMN di Indonesia terdiri dari dua bentuk badan usaha yakni Perusahaan yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan

perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Dalam pasal 1 dijelaskan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 13 tahun 1998 pada pasal 2 dijelaskan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dalam PP No 12 tahun 1998 pada pasal 4 dijelaskan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Persero adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun Internasional dan memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan yang tegas maksud dan tujuan didirikannya perusahaan yang berbentuk Perum dengan perusahaan yang berbentuk Persero. Perum lebih menitikberatkan kepada pelayanan demi kemanfaatan umum, sedangkan Persero adalah mengejar keuntungan.

PT. Kereta Api (Persero) telah bertransformasi badan usahanya menjadi Persero dari Perum semenjak tahun 1998 dengan dikeluarkannya PP No 19 tahun

1998. Perubahan ini dimaksudkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha perkeretaapian seperti yang tercantum dalam UU tersebut. Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan ini maksud dan tujuan dari didirikannya perusahaan pun berubah. Dengan melihat kepada PP No 13 tahun 1998 dan UU No 19 tahun 2005 tujuan sebuah perusahaan yang berbentuk Persero adalah mengejar keuntungan.

Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) disebutkan Perseroan bertujuan turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan pemeliharaan prasarana perkeretaapian, pengoperasian prasarana perkeretaapian, pengoperasian usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api dan kemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas perubahan bentuk perusahaan PT. Kereta Api (Persero) dari Perum menjadi Persero seharusnya membawa dampak lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena dengan perubahan tersebut maksud dan tujuan pendirian perusahaan yang berbentuk Persero adalah mengejar keuntungan. Dengan demikian PT. Kereta Api (Persero) bisa lebih komersil tidak sekedar hanya melayani publik semata yang tentunya mengikuti prinsip-prinsip Perseroan seperti tercantum dalam UU No 1 Tahun 1995.

Dengan adanya perubahan bentuk perusahaan dari Perum menjadi Persero memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menentukan tarif. Akan tetapi sesuai dengan Anggaran Dasar, perusahaan masih mengemban misi kemanfaatan umum. Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 1998 dalam pasal 4 diatur mengenai Persero yang mendapat penugasan khusus dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang perkeretaapian mendapat tugas khusus melayani masyarakat tanpa melupakan tujuan utamanya yaitu mengejar keuntungan.

Di dalam UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 66 telah ditegaskan bahwa Pemerintah dapat memberi penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Pada Penjelasan UU Nomor 19 tahun 2003 pasal 66 dijelaskan bahwa meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Jadi berarti penugasan tersebut harus memperhatikan tujuan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menciptakan laba dan selanjutnya menyetor pajak dan dividen ke negara.

Dengan adanya tugas khusus ini PT. Kereta Api (Persero) tidak bisa menentukan tarif angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi. Kebijakan tarif ini ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kepentingan komersialnya PT. Kereta Api

(Persero) bisa menentukan tarif angkutan kereta api penumpang kelas bisnis dan eksekutif. Untuk menutupi kerugian akibat biaya operasi pada angkutan penumpang kelas ekonomi, pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mengatur kompensasi bagi perusahaan atas biaya-biaya yang pantas dari kewajiban pelayanan publiknya untuk mengoperasikan pelayanan kelas ekonomi dengan tarif subkomersil yang ditetapkan oleh pemerintah dikenal dengan *Public Service Obligation* (PSO). Penetapan tentang PSO ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, masing-masing No.KM 19/Tahun 1999, No.83/KMK.03/1999 dan No.KEP.024/K/03/1999 tanggal 4 Maret 1999.

Tentunya dengan perbedaan tujuan dari perusahaan yang berbentuk Perum dengan perusahaan yang berbentuk Persero akan menimbulkan perbedaan terhadap kinerja keuangan masing-masing badan usaha. Oleh karena hal tersebut di atas diperlukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan ketika berbentuk Perum maupun ketika Persero, agar hasilnya kemudian bisa dibandingkan dan diketahui apakah dengan perubahan bentuk perusahaan tersebut telah menimbulkan perbedaan terhadap kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero).

Pengertian kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. IAI (dalam Mila Meliana, 2005 :16) memberikan penjelasan mengenai kinerja yaitu informasi kerja perusahaan terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai perubahan

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Mangkunegara (2001 : 67) menjelaskan bahwa istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, kinerja merupakan suatu hasil, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya yang dicapai oleh seorang pegawai dari suatu proses tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.

Lebih lanjut kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi yang dimaksud adalah efektivitas operasional organisasi, baik dari segi manajerial maupun ekonomi operasional.

Segel dan Sein (dalam Damayanti 2006:24) memberikan batasan yang rinci tentang kinerja, yaitu pernyataan yang menyajikan ukuran hasil yang sebenarnya dari beberapa kegiatan pribadi atau kesatuan pada periode waktu yang sama. Hasil ini sebaiknya dibandingkan dengan anggaran atau ukuran standar yang diperoleh dengan beberapa asumsi keadaan selama periode yang sama.

Dari ungkapan di atas dapatlah ditarik suatu pengertian dari kinerja yaitu :

1. Kinerja merupakan hasil dari proses yang telah dijalankan oleh orang atau badan usaha dalam mencapai suatu tujuan.
2. Ukuran yang sering digunakan dalam menilai kinerja adalah efektivitas dan efisiensi.

Untuk mengetahui kinerja perusahaan perlu adanya suatu penilaian. Penilaian kinerja ini selain berfungsi sebagai alat bantu bagi perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan, juga memperlihatkan kepada investor maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Penilaian dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan sistem penghargaan dalam perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan akuntansi manajemen, penilaian terhadap kinerja perusahaan mengalami perkembangan dengan dikenalnya konsep *Balanced Scorecard* yang mengukur kinerja perusahaan dari dua aspek yaitu aspek keuangan dan non keuangan. Dalam *Balanced Scorecard* penilaian kinerja perusahaan dilihat dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif *customer*, perspektif proses bisnis intern, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penelitian yang dilakukan hanya mengukur pada perspektif keuangan perusahaan dan tidak mencoba untuk mengukur dari perspektif non keuangan. Penilaian terhadap kinerja keuangan memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomi yang telah diambil oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap peningkatan keuangan perusahaan. Sehingga bisa dijadikan dasar perencanaan tindakan yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

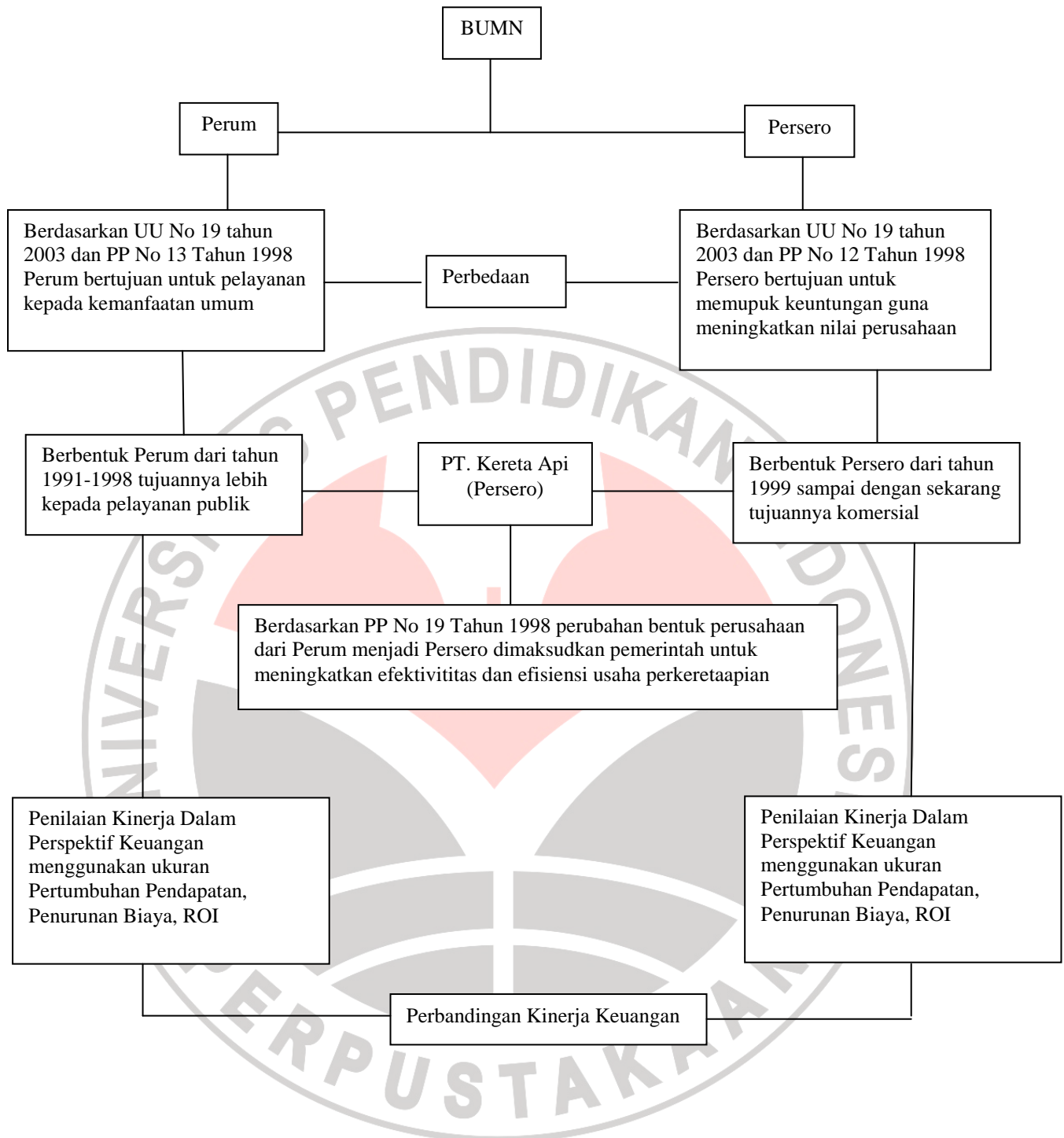
Penilaian kinerja dalam perspektif keuangan menurut Mulyadi (2001 : 4) bisa dilakukan dengan menggunakan ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan ROI seperti yang di katakan dalam bukunya, yaitu :

“Penilaian kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan menggunakan ukuran pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan peningkatan ROI”

Dengan adanya pertumbuhan pendapatan menunjukkan strategi perusahaan dalam perluasan pangsa pasar atau pengguna jasa produk perusahaan apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak. Penurunan biaya menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Keunggulan keuangan perusahaan dapat terlihat dari adanya pertumbuhan tingkat ROI yang merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut, sehingga dapat terlihat seberapa efektif perusahaan menanamkan dananya dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan.

Melalui ketiga ukuran dalam perspektif keuangan ini, yaitu pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan tingkat ROI, kinerja keuangan PT. Kereta API (Persero) ketika Perum dan Persero akan diukur dan dibandingkan.



Gambar 1.2
Bagan Alur Kerangka Pemikiran

1.5.2 Asumsi

Asumsi adalah sesuatu yang dianggap tidak berpengaruh atau konstan. Asumsi merupakan faktor-faktor yang diawasi. Asumsi dapat berhubungan dengan syarat-syarat kondisi dan tujuan. Asumsi memberikan hakikat, bentuk dan arah argumentasi. (Komarudin, 1998 : 22)

Sedangkan menurut Hoy & Miskel (dalam Sugiyono, 2003 : 56) “ Asumsi adalah pernyataan diterima kebenarannya tanpa pembuktian.”

Berdasarkan pengertian asumsi di atas , maka penulis merumuskan asumsi sebagai berikut :

1. Situasi dan kondisi perusahaan dianggap konstan.
2. Situasi dan kondisi perekonomian dianggap konstan.
3. *Feed back* atau umpan balik dari ketiga perspektif lainnya yaitu perspektif *customer*, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terhadap perspektif keuangan dianggap konstan.

1.5.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran di atas, maka penyusun merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bentuk Perusahaan Perseroan dengan bentuk Perusahaan Umum pada PT. Kereta Api (Persero) dinilai dalam perspektif keuangan.

Di dalam perspektif keuangan terdapat tiga aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan di antaranya adalah pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, serta ROI. Sehingga penyusun merumuskan sub hipotesisnya sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antara bentuk Perusahaan Perseroan dengan bentuk Perusahaan Umum pada PT. Kereta Api (Persero).
- 2) Terdapat perbedaan tingkat penurunan biaya antara bentuk Perusahaan Perseroan dengan bentuk Perusahaan Umum pada PT. Kereta Api (Persero).
- 3) Terdapat perbedaan tingkat *Return On Investment* antara bentuk Perusahaan Perseroan dengan bentuk Perusahaan Umum pada PT. Kereta Api (Persero).

1. 6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Waktu untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dari bulan April 2007 sampai dengan selesai.